

BAB IV

KEGAGALAN IGAD SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK SUDAN SELATAN

Upaya mediasi IGAD mengalami kebuntuan pada maret 2015 yang di karenakan terhentinya proses mediasi dengan melewati batas akhir kesepakatan damai. Pembicaraan perdamaian mengalami kebuntuan setelah kedua belah pihak tetap pada pendiriannya. Hal ini di tunjukan dengan mengingkari hasil keputusan pada putaran perundingan pertama terkait genjatan senjata yang masih di lakukan. Kegagalan IGAD sebagai mediator dikarenakan IGAD tidak dapat memberikan posisi tawar yang baik terkait pemerintahan transisi dengan pembagian kekuasaan pada perundingan kedua belah pihak dan adanya keterlibatan dari negara anggota IGAD yang menghambat proses mediasi tersebut.

A. Ketidakmampuan IGAD untuk Mengatasi Pembagian Kekuasaan pada Pembentukan Pemerintah Transisi Nasional

IGAD dalam hal ini mengusulkan protokol terkait pembentukan pemerintah transisi dalam membawa perdamaian antar kedua belah pihak untuk jangka panjang di Sudan Selatan. Protokol IGAD mengenai pembentukan pemerintahan transisi telah ditandatangani oleh kepala negara dan pemerintah, Presiden Salva Kiir. Namun hal tersebut ditolak oleh pemimpin Gerakan Sudan Peoples Pembebasan (SPLM), Riek Machar.

Dimana isi dokumen tersebut mendukung Presiden Kiir untuk tetap menjadi presiden Sudan Selatan dan akan diwakili oleh wakil presiden untuk dua setengah tahun ke depan dari hari di bentuk pemerintahan transisi. Selain itu, hanya jabatan Perdana Menteri yang di ditempati oleh para pemberontak, yang mana di sisi lain konstitusi

Sudan Selatan menempatkan Wakil Presiden atas Perdana Menteri . Dalam hal ini,tim IGAD mengatakan Perdana Menteri tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden .¹

Hal Ini secara teknis membuat usulan IGAD tidak layak untuk menyelesaikan konflik pemberontak Sudan Selatan dan telah memicu argumen baru karena pemerintah pada dasarnya menolak untuk melepaskan jabatan wakil presiden kepada oposisi bersenjata .Masalah utama dari pembentukan pemerintah transisi yaitu dalam hal pembagian kekuasaan eksekutif dimana PM. Hailemariam dari ethiopia mengusulkan 60 - 30 -10 distribusi portofolio antara pemerintah, SPLM-O,dan lain – lain. Namun, machar menolak hal tersebut dan mengharuskan pembagian 50 – 50 antara pemerintah dan SPLM-O.²

Dalam hal ini, kedua belah pihak melakukan dua hari perundingan intensif, pertama melalui tim negosiasi dan kemudian dalam pembicaraan langsung antara pemimpin kedua belah pihak gagal menghasilkan kompromi. terlihat bahwa masalah pembagian kekuasaan telah mengambil proses perdamaian IGAD. Mantan tahanan SPLM mengatakan bahwa protokol yang di gunakan oleh Otoritas Antar pemerintah tentang Pembangunan (IGAD), sebagai bias dan tidak adil.³ Dimana dokumen tersebut gagal membuat pendekatan yang akan membawa perdamaian.

¹ AllAfrica, Sudan : *Pemerintah Minta Dukungan Untuk Setuju Prinsip Protokol IGAD*, www.AllAfrica.com (di akses pada 7 Maret 2016)

² *Ibid*

³ Sudan Tribune, *Mantan Tahanan Mengatakan Usulan IGAD bias*, www.sudantribune.com (di akses pada 7 Maret 2016)

B. Ketidakmampuan IGAD sebagai Mediator untuk Menarik Diri dalam Konflik Sudan Selatan

IGAD sebagai mediator atau aktor pihak ketiga dapat memainkan peranannya dalam mempengaruhi proses perdamaian yang akan menjamin suatu keberhasilan atau kegagalan pada konflik Sudan Selatan. Dimana keberhasilan dari mediator dalam penyelesaian konflik, tergantung pada kredibilitasnya yang berupa kemampuan aktor yang menjadi mediator. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang mediator kehilangan kredibilitasnya yang dikarenakan ketidakmampuannya dalam memberikan pengaruh pada proses mediasi. Sehingga dalam penyelesaian konflik melalui proses mediasi menjadi bias.

Adapun P, Barston menjelaskan faktor hilangnya kredibilitas oleh mediator baik karena alasan hilangnya kerahasiaan, tantangan status, serta tuduhan keberpihakan. Dalam hal ini, IGAD sebagai mediator tidak mampu untuk menarik diri dalam konflik yang berlangsung di Sudan Selatan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan dari negara anggota IGAD dengan membawa kepentingan yang berbeda dalam penyelesaian konflik tersebut.

B.1 Keterlibatan Negara Anggota IGAD

Konflik yang terjadi di Sudan Selatan telah menarik keterlibatan aktor regional. Dalam hal ini, negara – negara anggota Otoritas Antarpemerintah tentang Pembangunan (IGAD), di antaranya Uganda, Kenya, Ethiopia dan Sudan. Hal ini khususnya terlihat

pada keterlibatan Uganda dengan dukungan militer kepada pemerintah Sudan Selatan untuk membantu memerangi pasukan oposisi.⁴

Sejak pecahnya kekerasan pada Desember, Uganda telah berpartisipasi pada permulaan konflik Sudan Selatan dengan mengirim pasukan dan pesawat ke perbatasan utara. Upaya yang dilakukan Uganda tersebut untuk melindungi Juba, Ibu kota negara dan Bor, Ibukota negara bagian Jonglei. Pertempuran tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas dan menelantarkan lebih dari 900.000 termasuk lebih dari seperempat juta yang telah melarikan diri ke negara tetangga sebagai pengungsi.⁵

Uganda mengklaim mengerahkan tentara pasukan pertahanan rakyat Uganda (UPDF) sebagai misi kemanusiaan, melindungi bandara dan infrastruktur penting lainnya di Juba, melindungi ibukota negara, warga negara dan sekitarnya dari ancaman pejuang oposisi bersenjata yang dipimpin oleh mantan wakil presiden, Riek Machar. Namun, pada kenyataannya Uganda mengerahkan pasukannya sekitar 1.500 dan 4.500 personel yang menyebar lebih jauh. Dimana hal tersebut bertujuan membantu pasukan pemerintah Sudan Selatan merebut kembali kota-kota utama dan ladang minyak dekat perbatasan dengan Sudan.⁶

Pada 23 Januari 2014, IGAD melakukan perjanjian gencatan senjata antara pihak pemerintah Sudan Selatan dan pihak oposisi, Dalam hal ini, pihak oposisi meminta penarikan penuh Pasukan Pertahanan Uganda (UPDF) di pemerintah Sudan Selatan, namun hal tersebut ditentang oleh pemerintah Sudan Selatan. Selain itu, Yohannes Anberbir menjelaskan bahwa Presiden Museveni Uganda, terang – terangan menolak

⁴ Sudan Tribune ,South Sudan accuses foreign powers of blocking peace deal, www.sudantribune.com. (di akses pada 5 Maret 2016)

⁵ Irinnews ,*regional interests stake south sudan crisis*, www.irinnews.org (diakses pada 6 Maret 2016)

⁶ *Ibid*

untuk menarik pasukan Uganda dari Sudan Selatan. Keberadaan UPDF ini sebagai bantuan kepada pemerintah Sudan Selatan dari pihak oposisi.

Dalam hal ini, pihak oposisi berpendapat bahwa Uganda sebagai mediator tidak harus terlibat dalam konflik internal dan diduga sebagai bentuk tidak menghormati pemerintah untuk penghentian perjanjian permusuhan kedua belah pihak ditandatangani pada 23 Januari 2014.⁷ Selain itu, kehadiran tentara Uganda serta yang lain di wilayah Sudan Selatan sangat ditentang oleh oposisi yang menuduh proses mediasi IGAD bias. Intervensi militer Uganda dalam membantu Sudan Selatan dikarenakan hubungan pribadi yang dekat antara Presiden Uganda, Museveni dan Salva Kiir. Selain itu juga terdapatnya kepentingan ekonomi Uganda di Sudan Selatan.

Kenya, dalam hal ini belum memberikan kontribusi pasukan apapun untuk mendukung pemerintah Sudan Selatan. Meskipun demikian, Kenya telah memainkan peran yang lebih jauh dalam mediasi untuk mendukung pemerintah Sudan Selatan.⁸

Ethiopia merupakan negara yang memimpin mediasi antara anggota IGAD. Dalam hal ini Ethiopia memberikan bantuan tawaran untuk para pemberontak. Dalam hal ini, Sudan yang juga merupakan tetangga Sudan Selatan yang memiliki permasalahan dengan pemerintah Sudan Selatan yang tak kunjung selesai. Permasalahan tersebut merupakan buah hasil dari perjanjian CPA yang sampai sekarang masih terdapat perebutan antara pembagian hasil minyak serta batas kawasan abyei antara pemerintah Sudan dan pemerintah Sudan Selatan.⁹

⁷ *Op.Cit.* Sudan Tribune. South Sudan accuses foreign powers of blocking peace deal

⁸ *Op.,Cit.* The Sudd Institute, *South Sudan's Crisis: Its Drivers, Key Players, and Post-conflict Prospects*.hal.11

⁹ *Op.Cit.* Irinnews ,*regional interests stake south sudan crisis*

Pemerintah Sudan Selatan secara terbuka menuduh Sudan membantu pemberontak, Namun Sudan membantah hal tersebut, yang kemudian Sudan menuduh Sudan Selatan mendukung Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) dan SPLA - Utara pemberontak . Ketegangan antara Sudan dan Sudan Selatan menggambarkan bahwa kedua negara tersebut tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Ketegangan antar kedua negara jika tidak dapat di selesaikan atau di kelola dengan baik, akan mengakibatkan konfrontasi terbuka antar kedua negara dan membahayakan perjanjian kerjasama. Hal tersebut justru akan mempersulit dalam proses perundingan antar pihak yang bertikai, mengingat hubungan pemerintah Sudan Selatan yang belum selesai dengan pemerintah Sudan.

Seperti yang telah di jelaskan oleh P. Barston, bahwa hilangnya kredibilitas mediator dapat di sebabkan oleh tantangan status dan keberpihakan, yang dapat menyangkut terkait hubungan sejarah di antara anggota sehingga sulit dalam membangun sebuah kepercayaan satu dengan lainnya. Dimana kedekatan tersebut akan berpengaruh pada netralitas IGAD sebagai mediator. Para pihak akan sulit mempercayai keterlibatan IGAD dalam proses mediasi yang mana antar anggota IGAD sebagai mediator dulunya memiliki hubungan sejarah baik dengan pemerintah Sudan Selatan maupun pemberontak.

Keterlibatan negara- negara anggota IGAD yaitu Ethiopia, Sudan, Kenya dan Uganda mengakibatkan ketidakpercayaan para pihak terkait mediasi yang dilakukan, terutama pada pihak pemberontak yang menganggap Uganda memberikan dukungan pada pemerintah Sudan Selatan melalui forum IGAD. Hal ini mengakibatkan mediasi yang di lakukan terhambat.

Terdapatnya dukungan dari negara – negara anggota IGAD untuk pemerintah Sudan Selatan dan Pemberontak membuat IGAD tidak mampu menarik diri. Dimana khususnya Uganda telah memberikan dukungan melalui penyeimbangan kekuatan militer yang membuat pihak pemerintah Sudan Selatan merasa paling kuat dan menang dalam melakukan pertempuran dengan pihak oposisi. Dimana penggunaan senjata dilakukan untuk melemahkan pihak pemberontak.

B.2 Keterlibatan Aktor Internasional

Keterlibatan aktor internasional dalam proses penyelesaian konflik Sudan Selatan juga mengidentifikasi adanya kepentingan yang di bawa oleh setiap aktor internasional. Dalam hal ini, terlihat jelas pada keterlibatan negara Cina dan Amerika Serikat yang di duga keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh selama pemerintahan Sudan Selatan. Meskipun Amerika Serikat memiliki pengaruh atas pemerintah dan faksi SPLM. Namun, terdapat ketakutan bahwa Sudan Selatan dapat di dominasi lebih dulu oleh Cina karena investasi minyak di negeri tersebut.

Dalam hal ini, Cina terus melakukan banyak hubungan diplomatik di belakang layar untuk memastikan bahwa negara Sudan Selatan tetap dilindungi. Keterlibatan Cina menjadi nyata dengan munculnya laporan bahwa Cina memasok senjata kepada pemerintah Sudan Selatan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kepentingan nasional negara China, di buktikan dengan pengiriman tentara China sebanyak 700 orang yang tiba di negara Sudan Selatan itu. Mereka di lengkapi dengan pesawat tanpa awak, kendaraan lapis baja, dan tank antirudal. Sebelumnya China sudah mengerahkan pasukannya sebagai bagian dari misi PBB namun dengan peran pendukung bukan pasukan bersenjata.¹⁰

¹⁰ BBC news, China- Sudan, <http://www.bbc.com/dunia/>, (di akses pada 18 Maret 2015)

Kemudian bukti dari adanya kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak Sudan Selatan adalah pada dukungnya terhadap Sudan Selatan untuk menjadi negara baru pada saat Sudan Selatan masih menjadi bagian negara Sudan dengan mencetuskan perjanjian CPA. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan pesawat Amerika Serikat yang di tempatkan di ladang minyak milik Sudan Selatan dengan dalih untuk menyelamatkan warga Amerika dan Jerman. Pesawat tersebut di tembaki oleh pemberontak yang mendukung Machar mantan wakil Presiden Sudan Selatan.¹¹

Selain itu, kelompok aktor internasional lain yang terlibat diantaranya yaitu termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Troika (AS, Norwegia dan Inggris). Dimana PBB melalui Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) telah dirusak dalam konflik lokal. Kedua belah pihak yang bertikai menuduh PBB mendukung lainnya. Pemerintah Sudan Selatan telah sangat kritis terhadap PBB dan memiliki motif pada menciptakan hubungan yang tidak sehat antara kedua lembaga. Terutama, mantan UNMISS, yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin pemberontak, Riek Machar sebelum krisis. Hal tersebut menyebabkan kecurigaan lokal terhadap UNMISS. Dalam hal ini, PBB telah melakukan pekerjaan yang sangat sulit dalam melindungi warga sipil di pangkalan dan katering untuk kebutuhan makan mereka.

Troika dibentuk selama negosiasi CPA dalam memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk pembicaraan dan membantu para pihak dalam menjalankan masalah yang sangat sulit. Troika tentu memiliki kepentingan tersendiri dan hal itu akan mencoba untuk mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian yang cocok dengan kepentingan yang di bawa oleh mereka, yang dapat mempersulit proses.

¹¹Antara News, *tiga pesawat As di Tembakai di Sudan Selatan*, <http://www.antaraneews.com/berita,di> (akses pada 18 Maret 2015)